

Vol. 9 No. 2 Desember 2007

ISSN 1410-8038

Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis

Terakreditasi "B" Nomor: 55/DIKTI/ Kep./2005

Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian Antar Wilayah di Indonesia

Azwardi

Upaya Fiskal dan Transfer Fiskal dalam Otonomi Daerah (Studi Empirik Keuangan Kabupaten /Kota Di Indonesia).

Didik Susetyo

Analisis Konsentrasi dan Prilaku Industri Susu Indonesia

Bernadette Robiani

Corporate Entrepreneurship and Firm Performance of Medium-Sized Manufacturing Industry In Indonesia: The Role Of Business Enviroment As Moderator

Herianto Puspowsito

Pengaruh Premi Risiko dan Keterentanan Pasar Terhadap Informasi Asimetri Serta Dampaknya Pada Underpricing Dengan Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderator (Suatu Kajian Empiris pada Perusahaan yang melakukan Emisi Saham Perdana dan Bursa Efek Indonesia).

M. Adam

Kemiskinan dan Peranan Wanita Pekerja Keluarga Kasus Keluarga Petani di Sumatera Selatan.

Nurlina Tarmizi

Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

JKEB	Vol. 9	No.2	Halaman 72 - 152	Palembang, Desember 2007	ISSN 1410-8038
------	--------	------	------------------	--------------------------	----------------

SEKAPUR SIRIH

Pada 18 November 2005 JKEB (Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis) dengan ISSN 1410-8308 telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai Jurnal Terakreditasi "B" dengan surat keputusan nomor: 55/DIKTI/Kep/2005. Ketetapan ini memotivasi JKEB untuk lebih meningkatkan kualitas dan membuat JKEB lebih me "regional". Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya naskah yang masuk dan dimuat dari para ilmuwan FE Unsri maupun dari beberapa universitas/instansi di luar Universitas Sriwijaya, antara lain dari Universitas Andalas, Universitas Riau, BPPT, STIE Jakarta, Universitas Bandar Lampung, dan universitas yang berada dalam lingkup Kopertis Wilayah II. Selain itu, JKEB juga telah memuat tulisan bersama antara Dosen FE Unsri dengan para Guru Besar dimana dosen yang bersangkutan menimba ilmu, antara lain dengan Guru Besar dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia.

Untuk mensyukuri keberhasilan tersebut, JKEB Volume 9 No. 2 Tahun 2007 menerbitkan edisi khusus dengan memuat naskah dari para Dosen FE Unsri yang telah berhasil menyelesaikan program S3 (Doktor) dari Universitas Padjadjaran, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia. Terbitan volume ini meliputi permasalahan Fiskal, Industri, Corporate Enterpreneurship, Informasi Asimetri dan Female Family Worker. Naskah pada terbitan ini sepenuhnya merupakan bagian dari disertasi para penulis.

Semoga di masa yang akan datang JKEB dapat dijadikan sarana berbagi ilmu dan hasil penelitian bagi peneliti dan pembaca dari berbagai negara di Asia Tenggara.

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

<i>Agusri</i>	: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian Antar Wilayah di Indonesia	72 - 80
<i>Didik Suseyo</i>	: Upaya Fiskal dan Transfer Fiskal Dalam Otonomi Daerah (Studi Empirik Keuangan Kabupaten/Kota di Indonesia).	81 - 98
<i>Bernadette Robiani</i>	: Analisis Konsentrasi dan Prilaku Industri Susu Indonesia	90 - 103
<i>Herianto Purponawarito</i>	: Corporate Entrepreneurship and Firm Performance of Medium-Sized Manufacturing Industry In Indonesia: The Role Of Business Enviroment As Moderator	104 - 117
<i>M. Adam</i>	: Pengaruh Premi Risiko dan Keterentanan Pasar Terhadap Informasi Asimetri Serta Dampaknya Pada Underpricing Dengan Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderator (Suatu Kajian Empiris pada Perusahaan yang Melakukan Emisi Saham Perdana dan Bursa Efek Indonesia).	118 - 133
<i>Nurana Tarmizi</i>	: Kemiskinan dan Peranan Wanita Pekerja Keluarga Kasus Keluarga Petani di Sumatera Selatan	134 - 152

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN ANTAR WILAYAH DI INDONESIA

Azwardi

ABSTRACT

The main objective of this research is to analyze the impact of fiscal decentralization on interregional economic performance in Indonesia. In this analysis the method used to explain the impact is multiplier (income and output multiplier) and it is extended to an Interregional Computable General Equilibrium (IRCGE) model based on the development of Interregional Social Accounting Matrix (IRSAM). The study found that development expenditure gave greater income multiplier and output multiplier than current expenditure. On the whole the intraregional Java have more impact than outer Java. Based on the results of the simulation scenario, the reduction on current expenditure caused the decrease of interregional economic performance. Meanwhile the increase of PAD caused greater interregional economic performance and the increase of revenue sharing for outer Java caused the decrease of interregional economic performance.

Keywords: The Impact of Fiscal Decentralization, Interregional Computable General Equilibrium (IRCGE), Interregional Social Accounting Matrix (IRSAM), Economic Performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian antar wilayah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah income multiplier dan output multiplier serta diperluas dengan model keseimbangan umum antar wilayah atau Interregional Computable General Equilibrium (IRCGE) yang dibangun berdasarkan Interregional Social Accounting Matrix (IRSAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan memberikan income multiplier dan output multiplier yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin. Secara keseluruhan intraregional Jawa memperoleh dampak yang lebih besar jika dibandingkan Luar Jawa. Hasil simulasi skenario pengurangan pengeluaran rutin akan menyebabkan kinerja perekonomian antar wilayah menurun; sedangkan meningkatnya PAD menyebabkan kinerja perekonomian antar wilayah meningkat dan meningkatnya Dana Bagi hasil untuk Luar Jawa menyebabkan memurnanya kinerja perekonomian antar wilayah.

Kata Kunci: Dampak Desentralisasi Fiskal, Interregional Computable General Equilibrium (IRCGE), Interregional Social Accounting Matrix (IRSAM), Kinerja Perekonomian.

PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi pemerintahan dalam era otonomi daerah berimplikasi luas terhadap tata pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan ruang kepada daerah untuk

mengelola pemerintahan berdasarkan inisiatif lokal (*local discretion*) yang dimiliki, sehingga pemberian pelayanan kepada publik dapat dilakukan secara optimal (Chalid, 2005). Karena itu, peranan anggaran cukup penting, khususnya dalam pembiayaan pembangunan.

Permasalahan anggaran dalam masa otonomi daerah masih sering diperdebatkan oleh daerah. Fenomena ini muncul karena selama ini di Indonesia terdapat hubungan yang asimetris antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bidang keuangan publik. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan fiskal secara vertikal (*vertical fiscal imbalance*) dan ketimpangan fiskal secara horizontal (*horizontal fiscal imbalance*), sehingga akhirnya menimbulkan ketimpangan antar wilayah (*regional inequality*), khususnya antara Jawa dan Luar-Jawa (Hidayat, 1992: 271-273; Wuryanto, 1996: 173-179; Silalahi, 2000: 87-101; Sjafrizal, 2000: 11-16).

Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kecemburuan antar wilayah, sehingga menimbulkan berbagai gejala di beberapa daerah yang disikapi oleh pemerintahan Habibie dengan mengeluarkan UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Selanjutnya timbul suatu pertanyaan sampai sejauh manakah kebijakan desentralisasi fiskal melalui UU No. 25 tahun 1999 yang dimulai sejak 1 Januari 2001 dapat meningkatkan kinerja perekonomian antar wilayah (Jawa-Luar Jawa) secara keseluruhan? Selain bagaimana dampak berkurangnya pengeluaran rutin, peningkatan PAD dan peningkatan Dana Bagi Hasil apabila dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pembangunan terhadap kinerja perekonomian antar wilayah di Indonesia. Pertanyaan tersebut timbul karena sebagian besar daerah mengeluhkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah dirasakan masih belum cukup untuk membiayai pembangunan daerahnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Teori Keseimbangan Umum dan Model Keseimbangan Umum

Keseimbangan penawaran dan permintaan di suatu pasar dapat dikaji dengan

menggunakan *partial equilibrium analysis*. Sedangkan interaksi antara pelaku ekonomi di berbagai pasar dapat dianalisis dengan menggunakan *general equilibrium analysis* yang merupakan rujukan *Walrasian equilibrium* dan selanjutnya digunakan sebagai pijakan untuk menjelaskan model keseimbangan umum ekonomi (*Computable General Equilibrium* atau CGE).

Model CGE digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis keterkaitan antara berbagai pasar yang mencakup interaksi antara industri, faktor produksi dan institusi, termasuk pemerintah bilamana terdapat suatu kebijakan yang berdampak bagi seluruh perekonomian. Model CGE *berpijak* dari *general equilibrium theory*, relatif lebih baik bila digunakan untuk mengkaji dampak dari berbagai kebijakan pemerintah dibandingkan dengan model lainnya (Bergman, 1990: 1-26; Chowdury and Kirkpatrick, 1994: 96; Gillis-Perkins-Roemer-Snodgrass, 1997: 114-115; Vargas, 199: 3-4).

Social Accounting Matrix (SAM)

Model CGE dibangun dengan menggunakan Tabel SAM (*Social Accounting Matrix*), yakni sebuah matrik yang merangkum neraca sosial dan ekonomi dari suatu negara secara menyeluruh yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu neraca *endogenous* dan neraca *eksogenous*. Neraca *endogenous* terdiri dari faktor produksi, institusi dan produksi, sedangkan aktivitas lainnya dimasukkan ke dalam neraca *eksogenous* (Tirta Hidayat, 1991: 340; Wuryanto, 1996: 83-84).

Dalam Tabel SAM prinsip *double entry* digunakan dalam pembuatan *Social Accounting Matrix*, yaitu penerimaan sama dengan pengeluaran. Tabel SAM dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Social Accounting Matrix* untuk satu perekonomian dan *Inter Regional Social Accounting Matrix* atau IRSAM yang cenderung memberikan gambaran lalu lintas perekonomian antar wilayah.

Desentralisasi Fiskal

Menurut Boex (2001: 3) pengertian desentralisasi fiskal adalah:

"Fiscal decentralization is the assignment of fiscal decision-making powers and management responsibilities to lower levels of government. This definition implicitly assumes that local governments have a certain degree of fiscal discretion of autonomy, and that subnational governments are primarily accountable to their regional or local constituents".

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal (Boex, 2001: 4-7; Martinez-Vazquez, 2002: 5-10). *Pertama*, kewenangan pengeluaran yang berhubungan dengan fungsi pemerintahan dan tanggungjawab pengeluaran pada tingkat pemerintahan (pusat dan daerah); *kedua*, kewenangan penerimaan yang berhubungan dengan sumber penerimaan pajak dan bukan pajak untuk membiayai pengeluaran tersebut; *ketiga*, transfer, berhubungan dengan dana tambahan sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; *keempat*, pinjaman daerah untuk menutupi defisit yang terjadi jika belanja lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak dan bukan pajak serta transfer.

Berdasarkan pengertian tersebut, melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer dan pinjaman daerah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kebijakan Anggaran (Budget Policy)

Salah satu pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian adalah pemerintah yang dapat menetapkan kebijakan di bidang anggaran. *Budget policy* menurut Musgrave (1959: 205-231) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada tiga aspek yang saling

berkaitan, yaitu: *resource transfer, incidence and output*

Kebijakan anggaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap peralihan pemakaian sumberdaya yang dibutuhkan oleh pemerintah dan swasta. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya *perubahan pendapatan* yang diterima oleh berbagai institusi. Selanjutnya anggaran pemerintah akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya yang dapat digunakan oleh swasta untuk *menghasilkan sejumlah output*, sehingga berdampak terhadap perubahan teknologi dalam proses produksi, penawaran tenaga kerja dan tabungan dalam struktur perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian Terdahulu

Model CGE *pertama kali* dikemukakan *Leif Johansen* pada tahun 1960 dalam disertasinya yang berjudul *A Multi-Sectoral Study of Economic Growth* yang menganalisis pertumbuhan ekonomi Norwegia. Tulisannya mengkaji dampak berubahnya alokasi input terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengintegrasikan berbagai variabel ekonomi (dalam Bergman, 1990: 6-10; dan dalam Chowdury dan Kirkpatrick, 1994: 94-104).

Penelitian mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian dengan menggunakan model keseimbangan umum antar wilayah relatif masih terbatas, antara lain untuk Indonesia baru dilakukan oleh Wuryanto (1996). Dalam disertasinya berjudul *"Fiscal Decentralization and Economic Performance In Indonesia: An Interregional Computable General Equilibrium Approach"*, Wuryanto ingin melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian nasional dan regional secara komprehensif.

Model IRCGE atau *Interregional Computable General Equilibrium* yang digunakan Wuryanto (1996) merupakan perluasan dari model CGE sektor riil dan moneter Indonesia yang dibangun oleh Thorbecke dalam studinya yang berjudul *"Adjustment and Equity*

in Indonesia: A Computable General Equilibrium Model Integrating Real and Financial Transactions (Thorbecke, 1992: 85-100).

Wuryanto (1996) dalam penelitiannya hanya berpijak pada sisi riil model Thorbecke dan menghilangkan aspek moneter serta memperluasnya dengan membagi Indonesia menjadi dua wilayah makro, yaitu Jawa dan Luar Jawa serta memasukkan unsur pemerintah daerah di samping pemerintah pusat. Rumah-tangga dan faktor produksi di Jawa dipecah menjadi wilayah mikro yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan luar Jawa meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur.

Berdasarkan hasil simulasi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional akan selalu diikuti oleh peningkatan ekonomi di satu wilayah dan penurunan ekonomi di wilayah lainnya. Wilayah Jawa lebih diuntungkan karena kontribusi perekonomian Pulau Jawa cukup dominan bagi perekonomian Indonesia. Cara yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan secara sektoral tambahan transfer antar tingkatan pemerintahan memberikan akibat yang khas bagi masing-masing wilayah makro. Di Jawa "reaksi" ekonomi wilayah terhadap tambahan transfer yang dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur sosial lebih baik dibandingkan bila alokasinya dialihkan untuk program pembangunan infrastruktur ekonomi. Sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di Luar Jawa. Dalam konteks perekonomian wilayah *terdapat trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan antar-rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini Indonesia diklasifikasikan menjadi dua wilayah makro, yaitu Jawa dan Luar Jawa. Dalam setiap wilayah makro dilakukan agregasi faktor produksi dan rumah tangga. Sedangkan untuk pemerintah daerah merupakan agregasi dari

pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan untuk membuat Tabel IRSAM 2001 dan membangun model IRCGE dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data silang (*cross section*). Data sekunder meliputi Tabel SAM Indonesia 2000 yang *di-update* menjadi Tabel SAM 2001 dengan menggunakan Sakernas Tahun 2001, Susenas Tahun 2001, PDB Tahun 2001, PDRB Tahun 2001, Statistik Keuangan Daerah Tahun 2001, Neraca Modal Pemerintah Pusat Tahun 2001, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2001, APBN Tahun 2001, APBD Tahun 2001, Matriks Investasi Pemerintah Pusat Tahun 2001, Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2001 dan Statistik Indonesia Tahun 2001. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Departemen Keuangan.

METODE ANALISIS

Dalam penelitian ini digunakan *multiplier analysis* (*output multiplier* dan *income multiplier*) dengan bantuan *software I-O SAM* untuk menjawab dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian antar wilayah di Indonesia. Sedangkan model IRCGE digunakan untuk mengetahui dampak berubahnya *variable shock* terhadap kinerja perekonomian antar wilayah yang dibandingkan dengan kondisi awal (*baseline*). Model IRCGE dalam penelitian ini terdiri dari sembilan blok persamaan, meliputi blok produksi, faktor produksi, komoditas regional, pendapatan dan pengeluaran institusi, pemerintah pusat dan daerah, tabungan-investasi, produk domestik bruto, struktur harga dan keseimbangan. Secara keseluruhan model IRCGE penelitian terdiri dari 78 *block equations*, 369 *single equations*, 87 *block variables* dan 416 *single variables*, secara teknis

regional. Nilai *regional imports*, masing-masing sebesar Rp 406.252.050 (58,64 %) untuk Jawa dan untuk Luar Jawa senilai Rp 286.523.310 (41,36 %).

Pendapatan untuk wilayah mikro di Jawa tertinggi diperoleh rumahtangga *West Java* (Rp 845.662.710). Sedangkan di Luar Jawa pendapatan rumahtangga tertinggi dicapai oleh *Sumatera* (Rp 644.795.390). Tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah Jawa sebesar Rp 254.438.700 lebih tinggi bila dibandingkan dengan Luar Jawa, yaitu sebesar Rp 242.210.940. Tingkat pengangguran di Jawa relatif lebih tinggi, yakni sebesar 4,90%, sedangkan di Luar Jawa sebesar 4,50%.

Dampak Menurunnya Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah di Jawa Sebesar 20%

Dalam skenario 1 pengeluaran rutin pemerintah daerah (Pemda) di Jawa mengalami pengurangan sebesar 20%, diasumsikan digunakan sebagai dana tambahan untuk pengeluaran pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan pelayanan umum. Pengurangan pengeluaran rutin di Jawa memperlemah kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Pengurangan pengeluaran rutin di Jawa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor pelayanan umum memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penurunan kinerja perekonomian Jawa dibandingkan bila digunakan untuk sektor ekonomi atau sosial.

Dampak Menurunnya Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah di Luar Jawa Sebesar 30%

Dalam skenario 2 pengeluaran rutin Pemda di Luar Jawa mengalami pengurangan sebesar 30%, digunakan sebagai dana tambahan untuk pengeluaran pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan pelayanan umum. Pengurangan pengeluaran rutin di Luar Jawa juga memperlemah kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Pengurangan pengeluaran rutin di Luar Jawa yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran di sektor sosial memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penurunan kinerja perekonomian Luar Jawa, dibandingkan bila digunakan untuk sektor ekonomi atau pelayanan umum.

Dampak Meningkatnya Penerimaan PAD Pemerintah Daerah di Jawa Sebesar 15%

Dalam skenario 3 penerimaan PAD Pemda di Jawa meningkat sebesar 15% yang diasumsikan digunakan sebagai dana tambahan untuk membiayai pengeluaran pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan pelayanan umum. Peningkatan PAD di Jawa akan meningkatkan kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Peningkatan PAD di Jawa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor pelayanan umum memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap peningkatan kinerja perekonomian Jawa, dibandingkan bila digunakan untuk sektor ekonomi dan sosial. Meningkatnya kinerja perekonomian menimbulkan *trade-off* dengan tingkat ketimpangan pendapatan di kedua wilayah makro.

Dampak Meningkatnya Penerimaan PAD Pemerintah Daerah di Luar Jawa Sebesar 30%

Dalam skenario 4 penerimaan PAD Pemda di Luar Jawa meningkat sebesar 30% yang diasumsikan digunakan sebagai dana tambahan untuk membiayai pengeluaran pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan pelayanan umum. Peningkatan PAD di Luar Jawa juga akan meningkatkan kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Peningkatan PAD di Luar Jawa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor ekonomi memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap peningkatan kinerja perekonomian Luar Jawa, dibandingkan bila digunakan untuk sektor sosial atau pelayanan umum. Meningkatnya kinerja perekonomian menimbulkan *trade-off* dengan tingkat ketimpangan pendapatan di kedua wilayah makro.

Dampak Meningkatnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Daerah di Luar Jawa sebesar 15 %.

Dalam skenario 5 penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) di Luar Jawa meningkat sebesar 15% yang diasumsikan digunakan sebagai dana tambahan untuk membiayai pengeluaran pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan pelayanan umum. Peningkatan DBH di Luar Jawa memperlemah kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Peningkatan DBH di Luar Jawa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor sosial memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penurunan kinerja perekonomian Luar Jawa, dibandingkan bila digunakan untuk sektor ekonomi atau pelayanan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dampak *income multiplier* dan *output multiplier* wilayah Jawa lebih besar dibandingkan Luar Jawa. Pengeluaran pembangunan memberikan *income multiplier* dan *output multiplier* yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Dampak terbesar untuk wilayah Jawa diperoleh rumahtangga Jawa Barat, sedangkan untuk Luar Jawa diterima oleh rumahtangga Sumatera.
2. Hasil estimasi terhadap model IRCGE dengan menggunakan data pada Tabel IRSAM 2001 diketahui bahwa kinerja perekonomian Jawa memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Luar Jawa.
3. Pengurangan pengeluaran rutin di Jawa memperlemah kinerja perekonomian di kedua wilayah makro, tetapi penurunan yang terjadi relatif kecil. Pengurangan pengeluaran rutin di Jawa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor pelayanan umum memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penurunan kinerja perekonomian Jawa, dibandingkan

bila digunakan untuk sektor ekonomi atau sosial. Menurunnya kinerja perekonomian mengakibatkan menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan di kedua wilayah makro.

4. Pengurangan pengeluaran rutin di Luar Jawa juga memperlemah kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Pengurangan pengeluaran rutin di Luar Jawa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor sosial memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penurunan kinerja perekonomian Luar Jawa, dibandingkan bila digunakan untuk sektor ekonomi atau pelayanan umum. Menurunnya kinerja perekonomian mengakibatkan menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan di kedua wilayah makro.
5. Peningkatan PAD di Jawa akan meningkatkan kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Peningkatan PAD di Jawa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor pelayanan umum memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap peningkatan kinerja perekonomian Jawa, dibandingkan bila digunakan untuk sektor ekonomi dan sosial. Meningkatnya kinerja perekonomian menimbulkan *trade-off* dengan tingkat ketimpangan pendapatan di kedua wilayah makro.
6. Peningkatan PAD di Luar Jawa juga akan meningkatkan kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Peningkatan PAD di Luar Jawa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor ekonomi memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap peningkatan kinerja perekonomian Luar Jawa, dibandingkan bila digunakan untuk sektor sosial atau pelayanan umum. Meningkatnya kinerja perekonomian menimbulkan *trade-off* dengan tingkat ketimpangan pendapatan di kedua wilayah makro.
7. Peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) di Luar Jawa memperlemah kinerja per-

ekonomian di kedua wilayah makro. Peningkatan DBH di Luar Jawa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di sektor sosial memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penurunan kinerja perekonomian Luar Jawa, dibandingkan bila digunakan untuk sektor ekonomi atau pelayanan umum. Menurunnya kinerja perekonomian diikuti dengan menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan di kedua wilayah makro.

Saran

Berpijak dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran untuk kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah dapat memperkecil ketimpangan antara Jawa dengan Luar Jawa melalui penggabungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter, misalnya dalam bentuk perkreditan dan mendorong investor untuk berinvestasi di Luar Jawa dengan menyediakan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.
2. Pengurangan pengeluaran rutin seyogyanya dilakukan secara bertahap karena selama ini proporsinya lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan. Selain itu diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas aparatur pemerintah dan belanja barang untuk tujuan produktif.
3. Peningkatan PAD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan akan meningkatkan kinerja perekonomian di kedua wilayah makro. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu melakukan koordinasi agar penerapan Perda mengenai retribusi dan pajak daerah tidak bertentangan dengan Undang-undang, sehingga tidak *mendistorsi* perekonomian.
4. Model IRCGE penelitian dapat diimbangkan atas periode jangka pendek dan jangka panjang serta *bersifat dynamics*, sehingga skenario simulasi yang ditetapkan dalam penelitian ini dapat diuji kembali dan

diharapkan memberikan hasil yang lebih optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Bergman, Lars, Jorgenson, Dale W and Zala Erno. 1990. *General Equilibrium Modeling and Economic Policy Analysis*. USA: Basic Blackwell Inc.
- Boex, Jameson. 2001. An Introductory Overview of Intergovernmental Fiscal Relations. *Fiscal Policy Training Program 2001 and Fiscal Decentralization Course*. Georgia State University. Atlanta, Georgia.
- Chalid, Peny. 2000. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi, Tantangan dan Hambatan*. Jakarta : Kemitraan.
- Chowdhury, Anis and Kirkpartrick, Colin. 1994. *Development Policy and Planning, An introduction to Model and Techniques*. London : Routledge.
- Gillis-Perkins-Roomer-Snodgrass.1992. *Economic of Development*. Third Edition, USA.
- Hidayat, Tirta. 1996. Model Perencanaan Pembangunan Nasional Masa Depan. *Prisma Nomor Khusus 25 Tahun 1971-1996*: 49-57.
- _____, 1991. An Interregional Social Accounting Matrix for Indonesia : Theoretical Background and Construction. *EKIVol. 39 No. 41*: 335-350.
- Martinez-Vazquez, Jorge. 2001. The Assignment of Expenditure Responsibilities. *Fiscal Policy Training Program 2001 and Fiscal Decentralization Course*. Georgia State University. Atlanta, Georgia.
- Musgrave, Richard A. 1959. *The Theory of Public Finance*. International Student Edition. Kogakusha: McGraw-Hill.

- and Musgrave, Peggy B. 1984. *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore : Mc. Graw-Hill.inc
- Syaiful. 2000. Ketimpangan Ekonomi Daerah: "Tendensi Penyebab dan Kebijakan Penanggulangan". Disampaikan pada Kongres ISEI XIV di Makasar, 21-23 April 2000.
- Tarbecke, Erik. 1992. "The Indonesian Adjustment Experience in an International Perspective". *Jurnal Ekonomi Indonesia* :76-116.
- .1992. *Adjustment and Equity in Indonesia*. Paris: Development Centre of The Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD).
- Vargas, Eliecer E. Tembo, Gelson, Schreiner and Marcouiller, David W. 1999. *Computable General Equilibrium Modeling for Regional Analysis*.
- Wuryanto, Luky Eko. 1996. The Impact of Fiscal Decentralization on Interregional Economic Performance in Indonesia. *Disertation* (unpublished), Cornell University, USA.